

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI SOSIAL WILAYAH PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakter geografis sebagai wilayah pesisir di bagian utara Pulau Jawa. Kota ini mempunyai luas wilayah sekitar 373,70 km² atau kurang lebih 1,15 persen dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Semarang terletak di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa dengan kondisi bentang alam yang sangat beragam, mulai dari wilayah pesisir, dataran rendah, hingga kawasan perbukitan di bagian selatan kota. Ketinggian wilayah Kota Semarang bervariasi, berkisar antara ±0,75 meter hingga sekitar 348 meter di atas permukaan laut, sehingga menciptakan perbedaan karakter wilayah yang cukup kontras antara satu bagian kota dengan bagian lainnya.⁴⁷

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kota Semarang secara umum dibedakan menjadi dua kawasan utama, yaitu Semarang Bawah dan Semarang Atas. Semarang Bawah didominasi oleh dataran rendah dan kawasan pesisir, sedangkan Semarang Atas berada di wilayah perbukitan. Perbedaan karakter topografi ini berpengaruh besar terhadap pola permukiman, pemanfaatan ruang, serta tingkat kerentanan wilayah terhadap berbagai persoalan lingkungan. Kawasan pesisir dan dataran rendah, khususnya di wilayah Semarang Bawah, memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir dan rob yang dipengaruhi oleh pasang air laut, curah hujan tinggi, serta fenomena penurunan muka tanah yang terjadi secara bertahap.

Secara administratif, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara. Posisi geografis ini menjadikan Kota Semarang sebagai simpul penting kegiatan transportasi, perdagangan, dan

⁴⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Profil Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang," preprint, 2024.

distribusi barang di wilayah Jawa Tengah. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, pendidikan, dan industri. Kota ini juga menjadi bagian dari kawasan metropolitan Kedungsepur yang berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.

Kecamatan	Jumlah Desa
Mijen	14
Gunung Pati	16
Banyumanik	11
Gajah Mungkur	8
Semarang Selatan	10
Candisari	7
Tembalang	12
Pedurungan	12
Genuk	13
Gayamsari	7
Semarang Timur	10
Semarang Utara	9
Semarang Tengah	15
Semarang Barat	16
Tugu	7
Ngaliyan	10
Semarang	177

Gambar 2.1. Data Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang
(Sumber: Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala BPS Nomor 646 Tahun 2024)

Dalam struktur pemerintahan daerah, wilayah Kota Semarang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan.⁴⁸ Kepadatan kawasan perkotaan umumnya terkonsentrasi di wilayah dataran rendah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan jasa, sementara kawasan perbukitan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas kota, serta kawasan lindung yang pengelolaannya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Pembagian ruang tersebut menunjukkan bagaimana karakter fisik wilayah turut memengaruhi arah pembangunan dan pengelolaan kota secara keseluruhan.

⁴⁸ Pemerintah Kota Semarang, "Profil Kota Semarang," preprint, 2024.

2.1.1 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kondisi demografis Kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,71 juta jiwa, sehingga menempatkan Kota Semarang sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang tercatat sekitar 1,38 persen per tahun, dengan distribusi penduduk yang tidak merata antar kecamatan. Beberapa kecamatan seperti Tembalang, Pedurungan, dan Banyumanik menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi karena berkembang sebagai kawasan hunian, pendidikan, dan pusat aktivitas ekonomi yang terus mengalami ekspansi.⁴⁹

Kelompok Umur 0-75	Presentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Semarang		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	2023	2023	2023
0-4	6,69	6,43	6,56
5-9	6,90	6,43	6,66
10-14	6,96	6,41	6,68
15-19	8,65	8,89	8,77
20-24	10,21	9,84	10,02
25-29	8,47	8,13	8,30
30-34	7,93	7,67	7,80
35-39	7,44	7,51	7,48
40-44	6,93	7,20	7,06
45-49	6,98	7,55	7,27
50-54	6,85	6,98	6,91
55-59	6,26	5,82	6,04
60-64	3,57	4,06	3,82
65-69	2,74	2,89	2,82
70-74	1,75	1,93	1,84
75+	1,67	2,26	1,97
Total	100,00	100,00	100,00

Gambar 2.2. Presentase Penduduk Sesuai Umur dan Jenis Kelamin (Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024)

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang,” preprint, 2024.

Dilihat dari komposisi gender, struktur penduduk Kota Semarang relatif seimbang. Jumlah penduduk perempuan tercatat sekitar 983.725 jiwa atau sekitar 50,93 persen, sedangkan jumlah penduduk laki-laki sekitar 947.901 jiwa atau sekitar 49,07 persen dari total populasi.⁵⁰ Rasio jenis kelamin tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kesenjangan yang berarti dalam struktur demografis berdasarkan gender. Kondisi ini mencerminkan stabilitas sosial demografis yang relatif baik dan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan sosial di wilayah perkotaan.

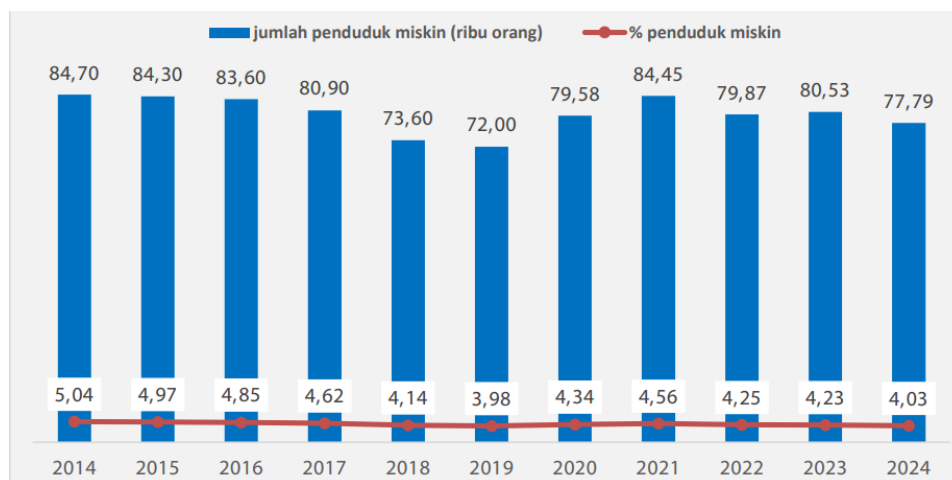
Struktur umur penduduk Kota Semarang didominasi oleh kelompok usia produktif, yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan kota. Dominasi kelompok usia produktif ini menjadi potensi besar bagi Kota Semarang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor produktif, meskipun di sisi lain juga menuntut penyediaan lapangan kerja, fasilitas publik, dan layanan sosial yang memadai.

2.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi Kota Semarang

Kondisi sosial-ekonomi Kota Semarang secara umum menunjukkan kecenderungan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemiskinan di Kota Semarang tercatat mengalami penurunan, meskipun garis kemiskinan meningkat seiring dengan naiknya biaya hidup di kawasan perkotaan. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin berada pada kisaran 4,03 persen dengan jumlah penduduk 77,790 orang, dan berhasil ditekan kembali menjadi sekitar 3,80 persen pada tahun 2025, yang merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam kurun waktu sekitar satu dekade terakhir.⁵¹ Cakupan Data Kemiskinan Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka 2024* (BPS Kota Semarang, 2024).

⁵¹ Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka 2024*.(2024)



Gambar 2.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2014-2024
(Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024)

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut secara kuantitatif menunjukkan berkurangnya jumlah penduduk miskin, namun di sisi lain kerentanan ekonomi rumah tangga miskin dan hampir miskin masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya standar pengeluaran minimum, terutama untuk kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan transportasi di kawasan perkotaan. Dengan demikian, meskipun angka kemiskinan menurun, tekanan ekonomi masih dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari sisi struktur ekonomi, Kota Semarang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ini banyak ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan, yang kemudian diikuti oleh sektor jasa seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, serta pendidikan. Struktur ekonomi tersebut menunjukkan pergeseran menuju sektor-sektor modern yang berbasis jasa dan industri. Namun demikian, di tengah dominasi sektor formal, sektor informal tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Aktivitas sektor informal seperti pedagang kaki lima, pekerja harian, dan jasa kecil di kawasan permukiman padat serta pusat kota menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat berpendapatan rendah. Keberadaan sektor informal ini berfungsi sebagai bantalan

ekonomi rumah tangga, meskipun sering kali dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, pembiayaan, dan kepastian ruang usaha di wilayah perkotaan.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang berada di kawasan pesisir utara dan berfungsi sebagai wilayah hilir yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Secara administratif, Kecamatan Semarang Utara memiliki luas wilayah sekitar 1.135,275 hektare atau sekitar 11,35 km² dan terbagi ke dalam sembilan kelurahan, yaitu Bandarharjo, Bulu Lor, Plombokan, Purwosari, Panggung Kidul, Panggung Lor, Kuningan, Tanjung Mas, dan Dadapsari.⁵²

Batas wilayah Kecamatan Semarang Utara meliputi Laut Jawa di sebelah utara, Kecamatan Semarang Timur di sebelah timur, Kecamatan Semarang Tengah di sebelah selatan, dan Kecamatan Semarang Barat di sebelah barat. Posisi geografis ini menjadikan Kecamatan Semarang Utara sebagai bagian penting dari koridor pesisir Kota Semarang sekaligus pintu masuk aktivitas perdagangan, pelabuhan, dan distribusi barang. Dari sisi demografis, Kecamatan Semarang Utara dihuni oleh lebih dari 130 ribu penduduk dengan kepadatan yang relatif tinggi. Jumlah penduduk berkisar antara 138.000 hingga 141.000 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang.⁵³ Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh dominasi kawasan permukiman padat dan berkembangnya aktivitas ekonomi pesisir yang menarik arus penduduk.

Secara sosial-ekonomi, Kecamatan Semarang Utara memiliki karakter sebagai kawasan pesisir industri dan perdagangan. Mata pencaharian penduduk banyak bergerak di sektor buruh industri, buruh bangunan, nelayan, perdagangan

⁵² Pemerintah Kota Semarang, "Geografis Dan Kependudukan Kecamatan Semarang Utara," preprint, 2024.

⁵³ Pemerintah Kota Semarang, "Profil Kecamatan Semarang Utara," preprint, 2024.

kecil, serta jasa informal. Kondisi tersebut menjadikan kecamatan ini memiliki peran strategis dalam kegiatan logistik dan distribusi barang, namun sekaligus memunculkan berbagai tantangan sosial perkotaan seperti kepadatan permukiman, kerentanan banjir rob, serta kebutuhan peningkatan kualitas lingkungan hunian.

Kelompok masyarakat rentan di Kecamatan Semarang Utara terutama berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan pesisir padat penduduk, seperti di Kelurahan Tanjung Mas, Bandarharjo, dan Kuningan.⁵⁴ Kecamatan ini termasuk salah satu dari tiga kecamatan dengan konsentrasi rumah tangga miskin ekstrem tertinggi di Kota Semarang, bersama dengan Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Pedurungan. Kecamatan Semarang Utara ini banyak diisi oleh lansia, penyandang disabilitas, dan warga tanpa pekerjaan tetap. Kondisi tersebut diperparah oleh banjir rob dan degradasi lingkungan pesisir yang berdampak pada infrastruktur, kualitas permukiman, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

2.3 Gambaran Umum Kelurahan Bandarharjo

Kelurahan Bandarharjo merupakan salah satu kelurahan pesisir di Kecamatan Semarang Utara dengan luas wilayah sekitar 342,68 hektare. Seluruh wilayah kelurahan ini berada pada dataran rendah dan sebagian besar berupa kawasan tepi pantai, aliran sungai, serta bantaran sungai.⁵⁵ Secara administratif, Kelurahan Bandarharjo berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kelurahan Dadapsari di sebelah selatan, Kelurahan Kuningan di sebelah barat, dan Kelurahan Tanjung Mas di sebelah timur. Kelurahan Bandarharjo terbagi ke dalam 12 RW dan 103 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 22.914 jiwa dan 7.655 kepala keluarga. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan struktur

⁵⁴ Espos.id, "1.024 KK Di Semarang Masih Miskin Ekstrem, Fokus Di 3 Kecamatan," preprint, 2024.

⁵⁵ Pemerintah Kota Semarang, "Geografis Dan Kependudukan Kelurahan Bandarharjo," preprint, 2024.

umur yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dari sisi sarana dan prasarana, kelurahan ini memiliki fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, serta kelembagaan masyarakat seperti LPMK, PKK, dan Karang Taruna yang berperan dalam mendukung aktivitas sosial kemasyarakatan.⁵⁶

Kondisi sosial masyarakat Bandarharjo ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan karakter permukiman padat di kawasan pesisir. Tingkat pendidikan warga masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah, sementara jumlah penduduk dengan pendidikan diploma dan sarjana relatif terbatas. Dari sisi ekonomi, karakter pesisir sangat memengaruhi mata pencaharian masyarakat, terutama nelayan serta pelaku industri pengolahan hasil laut. Keberadaan sentra pengasapan ikan “Kampung Mangut” menjadi ciri khas ekonomi lokal, di mana banyak rumah tangga menggantungkan pendapatan pada kegiatan penangkapan, pengolahan, dan perdagangan ikan. Permasalahan sosial di Kelurahan Bandarharjo sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pesisir. Wilayah ini sering terdampak banjir rob, genangan, dan penurunan muka tanah yang mempercepat degradasi kualitas permukiman. Kawasan pesisir seperti Tambak Lorok dan sekitarnya teridentifikasi sebagai permukiman kumuh dengan klasifikasi ringan hingga sedang, yang ditandai oleh kepadatan bangunan tinggi, keterbatasan akses sanitasi, dan kondisi drainase yang kurang memadai.

2.4 Gambaran Umum Rumah Susun Bandarharjo

Rumah Susun Bandarharjo dibangun sebagai bagian dari upaya penataan permukiman padat di kawasan pesisir Kelurahan Bandarharjo yang memiliki keterbatasan lahan. Pembangunan rumah susun tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1993 oleh Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Direktorat Cipta Karya, dilanjutkan dengan penataan lingkungan pada tahun 1995, dan

⁵⁶ Pemerintah Kota Semarang, “Profil Kelurahan Bandarharjo,” preprint, 2024.

pembangunan tahap kedua pada tahun 1996 oleh Pemerintah Kota Semarang bersama Perumnas.⁵⁷

Pembangunan Rumah Susun Bandarharjo bertujuan menyediakan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya tinggal di kawasan permukiman padat dan kumuh. Rumah susun ini dibangun di atas lahan milik negara seluas sekitar 2,4 hektare dan dirancang sebagai rumah susun sederhana sewa. Bangunan ini memiliki 30 unit hunian per lantai yang terdiri atas tipe 27, tipe 36, dan tipe 54, yang tersebar dari lantai II hingga lantai IV, dan ada 3 blok bangunan yaitu a, b dan c, dengan total 270 unit hunian. Sehingga memiliki total serta dilengkapi fasilitas dasar permukiman dan fasilitas bersama seperti mushola yang dikelola oleh UPTD Rumah Sewa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.⁵⁸

Penghuni Rumah Susun Bandarharjo pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal, seperti buruh, nelayan, pekerja pengolahan hasil laut, pedagang kecil, dan pekerja jasa. Rata-rata pendapatan rumah tangga penghuni berada pada kisaran Rp1.000.000–Rp2.000.000 per bulan, yang menempatkan mereka dalam kategori ekonomi bawah mendekati garis kemiskinan perkotaan. Faktor biaya sewa yang terjangkau dan lokasi yang dekat dengan tempat kerja menjadi alasan utama penghuni memilih tinggal di rumah susun ini.

⁵⁷ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, “Data Rumah Susun Bandarharjo,” preprint, 2024.

⁵⁸ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, “Informasi Teknis Rumah Susun Bandarharjo,” preprint, 2024.

No	Blok	Lt	Type	Jumlah	Biaya
1	I	II	27	8	75.000
2	I	II	36	2	85.000
3	I	III	27	8	65.000
4	I	III	36	4	75.000
5	I	IV	27	4	65.000
6	I	IV	54	4	110.000
7	II	II	27	48	75.000
8	II	II	36	12	85.000
9	II	III	27	48	65.000
10	II	III	36	12	75.000
11	II	IV	27	48	55.000
12	II	IV	36	12	65.000

Gambar 2.4. Data Harga Rumah Susun Bandarharjo
(Sumber: Disperkim Kota Semarang)

Hunian Rumah Susun Bandarharjo menyediakan beberapa pilihan tipe unit, yaitu Tipe 27, Tipe 36, dan Tipe 54, yang tersebar pada Lantai II, Lantai III, dan Lantai IV. Besaran tarif sewa ditetapkan berdasarkan tipe dan letak lantai unit. Tipe 27 dikenakan tarif sewa sebesar Rp55.000,- per bulan per unit dan berlaku sama pada seluruh lantai. Sementara itu, Tipe 36 memiliki variasi tarif sewa, yakni Rp85.000,- per bulan per unit di Lantai II, Rp75.000,- per bulan per unit di Lantai III, dan Rp65.000,- per bulan per unit di Lantai IV. Adapun Tipe 54 memiliki tarif sewa yang lebih tinggi seiring dengan luas unit yang lebih besar. Secara umum, kebijakan penetapan tarif sewa di Rumah Susun Bandarharjo menunjukkan upaya penyediaan hunian yang terjangkau dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.⁵⁹

⁵⁹ Semarang, "Informasi Teknis Rumah Susun Bandarharjo."



Gambar 2.5. Rumah Susun Bandarharjo (Sumber: lingkartv.com)

2.5 Profil Sosial-Ekonomi Perempuan Penghuni Rumah Susun Bandarharjo

Perempuan penghuni Rumah Susun Bandarharjo berada dalam konteks rumah tangga berpenghasilan rendah di kawasan pesisir Kota Semarang. Kondisi sosial dan ekonomi perempuan ini berkaitan erat dengan karakteristik keluarga, tingkat pendidikan, serta pola kerja sektor informal yang menjadi konteks penting dalam memahami dinamika kehidupan rumah tangga penghuni rusun. Karakteristik sosial perempuan penghuni Rumah Susun Bandarharjo dapat dilihat dari jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, dan status perkawinan. Sebagian besar perempuan berasal dari rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga lebih dari tiga orang, memiliki tingkat pendidikan yang didominasi pendidikan dasar dan menengah, serta berstatus menikah dan tinggal bersama suami, anak, dan kerabat dalam satu unit hunian ⁶⁰.

Dari sisi ekonomi, perempuan penghuni Rumah Susun Bandarharjo sering terlibat dalam aktivitas ekonomi sebagai pencari nafkah tambahan maupun pendukung usaha keluarga. Jenis pekerjaan yang dijalani umumnya berada di sektor

⁶⁰ Yunita Trilestari, “Studi Komparasi Karakteristik Kondisi Sosial Ekonomi Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pekunden Dan Bandarharjo Semarang” (Universitas Gadjah Mada, 2013), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/64052>.

informal, seperti berdagang kecil, bekerja sebagai buruh, membantu usaha pengolahan hasil laut, atau menjalankan jasa sederhana di lingkungan sekitar rusun. Pendapatan yang dihasilkan bersifat tidak tetap, namun berperan penting dalam menopang ekonomi rumah tangga. Kondisi kerentanan sosial-ekonomi perempuan di Rumah Susun Bandarharjo dipengaruhi oleh keterbatasan pendapatan, ketidakpastian pekerjaan, serta beban ganda dalam pengelolaan rumah tangga dan aktivitas ekonomi.⁶¹

Di lingkungan hunian vertikal seperti Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Bandarharjo, perempuan berperan sebagai penyokong ekonomi keluarga dan dituntut untuk berpartisipasi dalam menyumbang ekonomi komunal. Namun, pada saat yang bersamaan, mereka juga rentan terdampak kemiskinan yang spesifik menargetkan mereka⁶². Perempuan yang menghuni rumah susun Sewa (Rusunawa) Bandarharjo, terlepas dari kesulitan ekonomi mereka, tetap berupaya membentuk, mengelola, dan berpartisipasi dalam kelembagaan seperti organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan forum seperti "Permata Hebat" (Perempuan Mandiri Tangguh Hebat)⁶³

Bagi perempuan pesisir yang menghuni wilayah Rusunawa Bandarharjo dan sekitarnya, yang rata-rata hanya memiliki tingkat pendapatan rumah tangga pada kisaran Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 per bulan, kehadiran lembaga keuangan seperti koperasi yang tersebar di Kecamatan Semarang Utara menjadi media vital untuk mengakses terhadap layanan finansial seperti pinjaman. Melalui sistem simpan yang aman dan tidak mencekik keuangan masyarakat miskin seperti

⁶¹ Ibid

⁶² Angelia Putri Arti et al., "Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan (Studi Kasus Fenomena Feminisasi Kemiskinan Pada Perempuan Miskin Di Rusunawa Bandarharjo, Semarang). _002 Humas 2025" (other, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2025), <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/33502/>.

⁶³ Ibid

koperasi, perempuan dapat mengakses dana darurat untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan anak, modal awal usaha, dan kebutuhan lainnya.⁶⁴

Kader-kader PKK di Rusunawa Bandarharjo berperan aktif dalam berbagai program yang diselenggarakan kelurahan seperti Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Lomba Rumah Susun Sehat, dan forum "Rembug Perempuan" sebagai wadah untuk menyerap aspirasi atas permasalahan dihadapi perempuan⁶⁵. Organisasi seperti Permata Hebat juga mendorong pemberdayaan perempuan melalui perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Semarang dengan pemberdayaan, dukungan modal dan pemasaran⁶⁶

Meskipun perempuan di Rusunawa Bandarharjo dapat melakukan berbagai inisiasi sosial dan ekonomi komunal, realitas makrostruktural menempatkan mereka dalam spektrum kerentanan yang ekstrem. Kerentanan yang dialami kelompok ini bersifat bersilangan antara struktur ekonomi yang timpang dengan bias gender.⁶⁷

⁶⁴ Zuyyina Laksita Dewi and Djoko Yulastuti, "Pemanfaatan Ruang Bersama Di Rusunawa Kaligawe, Semarang," *Ruang* 1, no. 4 (2015): 181, <https://doi.org/10.14710/ruang.1.4.181-190>.

⁶⁵ Bandarharjo, "PKK- Pertemuan PKK Inti," 2019, <https://bandarharjo.semarangkota.go.id/pkk/pertemuan-pkk-inti>.

⁶⁶ Aditya, "Permata Hebat Berdayakan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Semarang," *RMOLJATENG*, April 22, 2025, <https://www.rmoljawatengah.id/permata-hebat-berdayakan-perempuan-dan-perlindungan-anak-di-kota-semarang-80598>.

⁶⁷ Arti et al., "Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan (Studi Kasus Fenomena Feminisasi Kemiskinan Pada Perempuan Miskin Di Rusunawa Bandarharjo, Semarang). _002 Humas 2025."